

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENERAPAN RBA DAN PERSIAPAN PROGRAM PEMERIKSAAN  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

**R. Indra Sarjono Sipahutar**

**NIM. 126232091**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2024**

**ANALISIS PENERAPAN RBA DAN PERSIAPAN PROGRAM PEMERIKSAAN  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

**Laporan Akhir diajukan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan  
pada Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan**

**R. Indra Sarjono Sipahutar**

**NIM. 126232091**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2024**

**ANALISIS PENERAPAN RBA DAN PERSIAPAN PROGRAM PEMERIKSAAN  
PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA**

**Laporan Tugas Akhir**

**Disusun Oleh:**



**R. Indra Sarjono Sipahutar**

**126232091**

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing**



**F.X. Kurniawan Tjakrawala S.E., M.Si., Ak., CA.**

## **ABSTRAK**

Risk Based Audit (RBA) merupakan metode pemeriksaan yang melakukan penerapan pendekatan risiko dalam pelaksanaan pemeriksaan. Penerapan metode RBA dilakukan supaya pemeriksaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, pemeriksaan yang efektif dan efisien akan menghasilkan laporan pemeriksaan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis penerapan RBA atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini juga melakukan analisis persiapan program pemeriksaan agar sejalan dengan RBA yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori keagenan dimana menekankan hubungan antara pihak manajemen dan pemilik (prinsipal) dalam Organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus di BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peneliti berharap dapat menggali penerapan RBA di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pendekatan studi kasus didukung dengan dokumen hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan kepada Tim Pemeriksa terkait kesesuaian dengan pedoman atau standar yang telah ditetapkan oleh BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tim Pemeriksa BPK dalam menerapkan, melaksanakan dan melakukan monitoring Risk Based Audit telah sesuai dengan panduan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh BPK.

Kata Kunci:

Risk based audit; teori keagenan; BPK; program pemeriksaan

## **ABSTRACT**

*Risk Based Audit (RBA) is an audit method that implements a risk approach in the implementation of the audit. The application of the RBA method is carried out so that the audit can be carried out effectively and efficiently, an effective and efficient audit will produce an adequate audit report. This study aims to analyze the application of RBA on the results of the audit conducted by the Audit Board of Indonesia (BPK) Representative Office of East Nusa Tenggara Province. This study also analyzes the preparation of the audit program so that it is in line with the previously established RBA. This study uses agency theory which emphasizes the relationship between management and owners (principals) in the Organization. This study uses a qualitative research method approach with a case study at the BPK Representative Office of East Nusa Tenggara Province. Researchers hope to explore the application of RBA in the BPK Representative Office of East Nusa Tenggara Province through a case study approach supported by audit result documents and requests for information from the Audit Team regarding compliance with the guidelines or standards set by the BPK. The results of the study indicate that the BPK Audit Team in implementing, implementing and monitoring Risk Based Audit has been in accordance with the guidelines and guidelines set by the BPK.*

**Keywords:**

*Risk based audit; agency theory; BPK; audit program*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Allah Bapa di Surga atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul "Analisis Penerapan RBA dan Persiapan Program Pemeriksaan pada Pemerintah Kabupaten Sikka". Laporan tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan (PPA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., ASEAN Eng., selaku Ketua Rektor Universitas Tarumanagara.
2. Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Jamaludin Iskak, S.E., M.Si., Ak., CA, CPA, CPI, ASEAN CPA, selaku Ketua Program Studi PPAk FEB Universitas Tarumanagara.
4. F. X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu serta telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Seluruh dosen, staf, dan karyawan di Program Studi PPA Universitas Tarumanagara yang telah membantu selama proses perkuliahan serta telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Orang tua dan keluarga, atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang tiada henti.
7. Teman-teman mahasiswa PPA Batch 34 BPK Perwakilan Provinsi NTT yang telah memberikan semangat dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang memerlukannya.

Jakarta, Desember 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Indra Sarjono Sipahutar', written over the printed name.

R. Indra Sarjono Sipahutar

## DAFTAR ISI

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ..... | i  |
| ABSTRAK .....                             | ii |
| KATA PENGANTAR.....                       | iv |
| DAFTAR ISI.....                           | vi |
| BAB I PENDAHULUAN.....                    | 1  |
| BAB II LANDASAN TEORI .....               | 3  |
| BAB III METODE PENELITIAN .....           | 8  |
| BAB IV HASIL DAN BAHASAN .....            | 9  |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....             | 14 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                       | 16 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Keuangan daerah meliputi semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022). Hal ini sesuai dengan reformasi birokrasi dan amanat otonomi daerah yang dilaksanakan sejak kebijakan desentralisasi tahun 1999. Oleh karena itu, keuangan daerah merupakan salah satu bidang yang menjadi sasaran reformasi. Reformasi keuangan daerah ditinjau dari sisi manajemen didukung antara lain oleh lima peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Saat ini terdapat 23 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan proses bisnis dan struktur organisasi yang berbeda-beda sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu pemerintah daerah tingkat II (kabupaten) di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Pemerintah Kabupaten Sikka. Pemerintah Kabupaten Sikka terdiri atas 50 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Setiap SKPD memiliki struktur organisasi dan proses bisnisnya masing-masing, sehingga proses penggabungan membutuhkan penyesuaian-penyesuaian yang signifikan.

Pemerintah Kabupaten Sikka mempunyai proses bisnis yang melibatkan 50 SKPD dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan satuan kerja untuk melakukan penatausahaan atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Sikka. Selain proses bisnis yang berbeda-beda antar SKPD, proses penggabungan aset SKPD juga harus dilakukan penyesuaian. Masing-masing SKPD di Kabupaten Sikka merupakan hasil dari perubahan nomenklatur pengelolaan keuangan negara sehingga terdapat SKPD yang digabung atau dipisah. Hal ini mengakibatkan aset yang sebelumnya tercatat pada SKPD sebelumnya harus dikeluarkan dan dicatat pada SKPD terbaru dan dilaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka. Rekonsiliasi aset tersebut harus dilakukan secara memadai agar nilai aset yang dilaporkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sikka juga merealisasikan belanja yang cukup besar, seperti untuk belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja tersebut dialokasikan untuk proses pengadaan di masing-masing SKPD. Namun seluruh pelaksanaannya dilakukan di unit-unit satuan kerja misalnya sekolah dan pusat kesehatan Masyarakat (puskesmas). Seluruh proses Pengadaan yang dilakukan di SKPD maka penanggung jawabnya juga berada di kantor SKPD tersebut, tetapi pelaksanaannya dilakukan sampai di tingkat unit satuan kerja. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan menjadi sulit untuk

dilakukan. Pengadaan yang dilakukan khususnya pada akhir tahun anggaran tidak dapat diawasi secara memadai. Nilai pengadaan yang tinggi mengakibatkan proses ini berisiko tinggi.

Selain itu, tingginya harapan masyarakat akan akuntabilitas keuangan daerah menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu topik yang akan dibahas pada penelitian ini. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu tindakan untuk menunjukkan akuntabilitas pemerintah daerah. Sebagai pengguna anggaran, kepala dinas atau pimpinan SKPD bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada pimpinan daerah. Begitu pula Pemerintah Kabupaten Sikka harus mempertanggungjawabkan realisasi anggaran yang telah dilakukan. Pertanggungjawabannya adalah terkait penggunaan dana baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun transfer keuangan dari pemerintah pusat/provinsi. Salah satu pertanggungjawabannya adalah terkait penggunaan dana untuk pengadaan barang dan jasa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tertuang pada Pasal 23 ayat (5). Pemeriksaan keuangan negara di Provinsi NTT dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi NTT. BPK Perwakilan Provinsi NTT harus memperoleh kepercayaan dari pengguna laporan keuangan atau para pemangku kepentingan. BPK Perwakilan Provinsi NTT perlu menjamin kualitas, ketepatan rekomendasi, manfaat LHP serta opini audit sehingga mendapatkan kepercayaan dari pengguna laporan keuangan. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan penerapan Risk Based Audit (RBA). BPK Perwakilan Provinsi NTT perlu memastikan bahwa penerapan RBA telah dilaksanakan secara memadai, program pemeriksaan telah disusun sesuai dengan penilaian risiko yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan RBA oleh tim pemeriksa pada Pemerintah Kabupaten Sikka?
2. Bagaimana penyusunan program pemeriksaan yang sesuai dengan RBA pada Pemerintah Kabupaten Sikka?
3. Bagaimana tim pemeriksa melaksanakan dan memantau pelaksanaan RBA pada Pemerintah Kabupaten Sikka?

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan RBA pada Pemerintah Kabupaten Sikka, program pemeriksaan yang telah disusun sesuai RBA, dan proses pelaksanaan serta pemantauan yang dilakukan oleh tim pemeriksa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asidik, M.S., T, F. K. (2024). Quality Control and Quality Assurance of The BPK's Audit of Regional Government Financial Statements Fiscal Year 2022 (Case Study at AKN VI). *International Journal of Current Science Research and Review*, Vol 7. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V7-i7-13>
- BPK RI. (2012). Petunjuk Teknis Pemahaman dan Pengujian Sistem Pengendalian Internal Pemeriksaan Keuangan, Keputusan BPK RI Nomor 2/K/I-XIII.2/7/2012. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. (2015). Pedoman Manajemen Pemeriksaan, Keputusan BPK RI Nomor 5/K/I-XIII.2/10/2015. Jakarta: BPK RI.
- BPK RI. (2017). Petunjuk Teknis Penilaian Risiko Pemeriksaan Keuangan, Pub. L. No. Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/4/2017. Jakarta: BPK RI.
- Jensen, M., M, W. (2009). *Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*. In R. Kroszner & L. Putterman (Eds.), *The Economic Nature of The Firm: A Reader* (pp. 283-303). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Nugraheni, N.M.T., P, B. (2021). Analysis of RBA Implementation and The Preparation of An Audit Program at Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, Vol. 7, No. 1. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.489>
- Nyarombe, F., M.E.G., K, I., K, D. K. (2015). The Effect of Risk Based Audit Approach on the Implementation of Internal Control Systems: A Case of Uasin Gishu County. *International Journal of Business and Management Invention*, Vol. 4, No.1.
- Pickett, K. H. S. (2015). *Audit Planning: A Risk-Based Approach*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781119201175>
- Purba, R.V., S., S. (2023). Penerapan Audit Berbasis Risiko sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ekonomi, Koperasi dan Kewirausahaan*, Vol. 14, No.2.
- Rozali, R. D. Y., M, J. (2015). Pengaruh Pelaksanaan Risk Based Internal Auditing Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3 No 3.
- Setyaningrum, D., S, F. (2012). Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 9, No. 2. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.10>
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.